

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A, Strauss, David, *The Living Constitution*, Oxford University Press, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 2009).
- Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),
hlm 6.
- Asshidiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta,
Konstitusi Pers, 2007.
- Amanullah, Naeni, *Demokratisasi Desa Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 2015).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008.
- Carl, *Political Theology: Four Chapter on the concept of sovereignty* (University
Of Chicago Press, 2005), hlm 13.
- C.J., Friedrich, *Man and His Government*, Nc Graw-Hill, New York, 1963, hal.
217.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- Ivo, D. Duchacek, Ivo, *Constitution/Constitutionalism* dalam Bogdanor, Vernon
(ed), *Blackwell's Encyclopedia of Political Science*, Blackwell, Oxford,
19867, hal, 142.
- K.A Pangkey, Deibbyt, *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Desa*.
- Law, David dan Power, Jason, eds, *State of Emergency, backrounder Security
Sector Governance and Reform*, October 2005, hlm 1.

Mahfud MD dalam saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial* Jakarta: Rajawali Pers”, 2019.

Mansyur, achmad. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018.

Menahan and Rizkiyansyah, *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu*, 110.

Mestika, Zed *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Pustaka Obor, 2008), 70.

Perdana, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*.

Philips, Hood, *Constitutional and Administrative Law*, ed, Sweet and Maxweel, London, 1987, hal, 5.

Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1996) hlm 1.

Thompsond, Brian, *Texbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press ltd, London, 1997, hal. 3.

Widjaja, A.W, *Pemerintahan Desa/Marga berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Skripsi

Ansori, Abdul Hamim, Analisis Produk Hukum Surat Keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Studi kasus Penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang). *Skripsi*, Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura, 2022).

Elfas, Fuad, Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Pilkades Sampai Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72

Tahun 2020. *Skripsi*, Jakarta; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rifky, Redy, Tinjauan Yuridis terhadap surat keputusan Bupati Sampang No. 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sampang. *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023.

3. Jurnal

M Hantoro, Novianto, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Kajian*, Vol.18 NO. 4 (Desember 2013) 237

Mahfud MD, Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Hukum 16*, no. 4. 2009.

Mubarak, Haris dan Fauzan, Indra, Sistem Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Lurah Serta Pengaruhnya Terhadap Pelayanan Publik”, *Jurnal Politea*, vol. 11 No./ 2.

Munawwar Kholid, Wawan, “The Implementation Of Simultaneous Village Head Implementation Policy In Realizing Participatory, Transparent, And Accountable Election Process In Indonesia *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. XI No. 1, Juni 2019, h. 88.

Proborini, “Reduksi kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa”, *Jurnal Yudisial* 11 no. 1 2018.

Simamora, Janpatar, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis, *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 23 No.1 (2011)

Soetrisno Yuniwati, Aspek Hukum Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sidoarjo Oleh Badan Permusyawaratan Desa Pada Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, vol.2 no.4.

Sukriono, Didik, Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1 (2009).

4. Undang-Undang

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 1 ayat 5

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 40 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014

Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tentang Pemilihan kepala Desa

Pasal 12 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015, 21.

Undang-Undang tentang pemilihan Umum, UU No. 7 Tahun 2017, LN No. 182, TLN No. 6109, Pasal 6 – Pasal 87

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Website

Pilkades di Sampang ditunda Imbas Covid 19, liputan6.com (Jum'at, 25 Mei 2023, 08-35 WIB).

Mashabi, Sania, Kemendagri Diminta Jelaskan Ke Publik Pertimbangan Tunda Pilkades 2020 diakses 24 April 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/13/18010841/kemendagri-diminta-jelaskan-ke-publik-pertimbangan-tunda-pilkades-2020?page=all>.

Ramadhan, unsur-unsur hukum kahanjahe, diakses, pada tanggal 18 desember, <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/penertian-hukum-yuridis>, 2023